

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi hasil adalah bentuk *retrun* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah (Adiwarman A. Karim, 2004:191)

Secara terminologi asing bagi hasil (*inggris*) dikenal dengan *Profit Sharing* (Muhammad, 2011:107). *Profit and Loss Sharing* (PLS) adalah suatu sistem usaha yang disandarkan pada prinsip keuntungan dan kerugian di tanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Ini artinya bahwa setiap keuntungan maupun kerugian usaha ditanggung secara bersama.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. (Ahmad Rofiq, 2004:153)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syari'ah berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang meminjam dana. Secara syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah* dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana).

Begitu juga halnya seperti yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah Mandiri KCP Jatinangor yang berlokasi di Jalan Raya Jatinangor Nomor 158 Sumedang yang berfungsi sebagai mitra dengan nasabahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Seperti perbankan lain, aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi yang aman.

Dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Ismail 2011:91)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2003: 97), aplikasi *mudharabah* dalam produk-produk penghimpunan dan pembiayaan dana. Pada sisi penghimpunan dana, diantaranya *al-Mudharabah* diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satunya pada tabungan deposito. Dalam UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad

antara nasabah penyimpan dana, bank syari'ah dan/atau UUS (unit usaha syari'ah).

Kontek *mudharabah* adalah salah satu kontrak yang dilakukan oleh nominal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Faktor langsung, diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah penentuan pendapatan dan biaya mudharabah dan kebijakan akunting (Muhammad, 2005:110).

Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian (Abdul Ghafur Anshori, 2007: 97).

Pada dasarnya, bank bagi hasil memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Artinya, dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang

diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang terhimpun tersebut.

Dalam perhitungan dan pembagian keuntungan atau bagi hasil bagi depasan merupakan ciri utama bagi bank syariah, berikut perhitungan bagi hasil Bank Syari'ah Mandiri berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Bank Syari'ah Mandiri yaitu bapak Abdurrahman faqih dengan Contoh Kasus : Ibu A memiliki deposito Rp. 500.000.000-, jangka waktu satu bulan, nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk Bank) Total saldo semua depasan Rp.12.084.975.466.497 dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp.50.799.956.290?

Jawab:

- a. Menurut perhitungan Bank Syari'ah Mandiri

$$\frac{\text{Deposito} \times \text{Eq Rate} \times \text{hari}}{360}$$

$$\frac{\text{Rp } 500.000.000 \times 5.0443\% \times 30 \text{ hari}}{360} = \text{Rp. } 2.101.791$$

- b. Menurut perhitungan Bank Syari'ah Mandiri dalam *brosur*

$$\frac{\text{Deposito}}{\text{Jumlah saldo depasan}} \times \text{jumlah bagi hasil} \times \text{nisbah}$$

$$\frac{\text{Rp.}500.000.000}{\text{Rp.}12.084.975.466.497} \times \text{Rp. } 50.799.956.290 \times 50\% = \text{Rp. } 1.050.890$$

- c. Menurut perhitungan dalam buku

$$\frac{\text{Deposito}}{\text{Jumlah saldo depasan}} \times \text{jumlah bagi hasil} \times \text{nisbah}$$

$$\frac{\text{Rp.}500.000.000}{\text{Rp.}12.084.975.466.497} \times \text{Rp. } 50.799.956.290 \times 50\% = \text{Rp. } 1.050.890$$

Dilihat dalam sistem perhitungan Bank Syari'ah Mandiri terdapat *equivalent rate* yang menggunakan persentase dimana persentase *equivalent rate* tersebut tidak ada dalam teori akad *mudharabah*. Sedangkan teori *mudrabahah* tidak tergantung pada *equivalent rate*, tetapi tergantung pada keuntungan bank tersebut. Terjadi perbedaan signifikan dalam hasil perhitungan bagi hasil yang diterapkan antara dalam *brosur*, buku dan sistem perhitungan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagi hasil *mudharabah* sehingga penulis mengambil judul :
“Pelaksanaan Bagi Hasil pada Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menguraikan hal-hal yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN terhadap pelaksanaan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

2. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN terhadap pelaksanaan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberi dua nilai kegunaan, yakni kegunaan praktisi dan kegunaan teoritis.

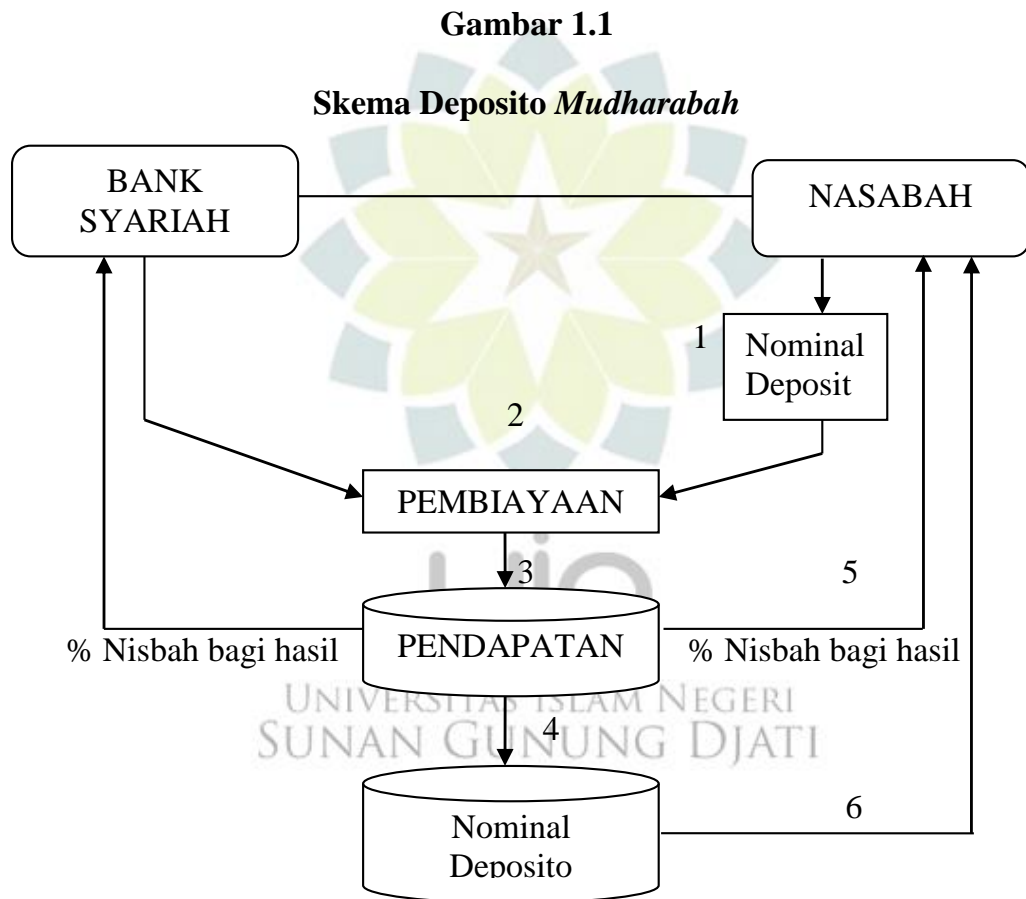
1. Kegunaan praktisi dan bagi pembuatan kebijakan serta masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas pertanyaan yang terkait dan juga sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan perbankan yang harus dikembangkan kedepannya.
2. Kegunaan teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu perbankan syari'ah, khususnya jurusan muamalah serta dalam rangka pengembangan masyarakat islam. Selain itu untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai pelaksanaan bagi hasil pada produk deposito di bank syari'ah mandiri.

E. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan penyalur dana bagi kegiatan sector riil. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* dijadikan landasan hukum untuk produk Deposito *Mudharabah* yang bertujuan menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah*. Kedua produk tersebut

ditawarkan dengan skema bagi hasil. Pada Deposito *Mudharabah*, nasabah sebagai *shahibul maal* akan memperoleh nisbah sesuai dengan keuntungan Bank. Pada Pembiayaan *Mudharabah*, Bank sebagai *shahibul maal* akan memperoleh nisbah sesuai dengan keuntungan *Mudharib*.

Secara umum bagi hasil dalam Deposito *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Ismail (2011:94)

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.

3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue shariang, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafe'i Antonio 2001:95)

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Rifqi Muhammad, 2008: 275).

Dasar hukum dari *mudharabah*, yakni antara lain yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ﴾

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ . الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ) (الْحَا فِظِ أَبِي
عَبْدَ اللَّهِ)

“Dari Shalih Ibn Suhaebi ra, berkata: Bahwasanya Nabi SAW bersabda: tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah SAW, yaitu; jual beli bertempo (kredit), *berqiradh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah dengan Isnad yang lemah)”. (Sunan Ibnu Majah, 768: 2289/2).

Pada dasarnya, setiap muamalah dan transaksi boleh, kecuali yang tegas-tegas mengharamkannya. Sebagaimana salah satu kaidah fiqih muamalah yang bersangkutan dengan ini, yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”(A. Djajuli, 2006:130).

Mengacu kepada kaidah hukum diatas, peneliti merumuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan muamalah dan transaksi diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Selain itu, secara umum keputusan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah* dapat dibedakan menjadi tiga: pertama, ketentuan mengenai Pembiayaan *Mudharabah*; kedua, rukun dan syarat pembiayaan; dan yang ketiga, ketentuan mengenai hukum pembiayaan. Adapun ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah meliputi hal-hal berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha;
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan Pengusaha);
4. *Mudharabah* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan;
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bentuk piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian;
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* atau pihak ketiga tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharin atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN;

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib;
10. Dalam hal penyandang dan (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Para ulama menyatakan dalam kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

Pembiayaan dengan prinsip akad *mudharabah* merupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. Ketentuan tersebut merupakan rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh dua pihak yang melakukan kerjasama yaitu penyedia dana (*shahib al maal*) dan pengelola (*mudharib*) adapun rukun dan syarat *mudharabah* menurut Ascarya (2007: 62) adalah :

1. Pelaku akad, yaitu penyedia dana (*shahib al maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *qabul*.

Menurut Ascarya (2007: 63-64) ada beberapa syarat pokok *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1. Usaha *mudharabah*, *shahib al maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam

usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi apabila shahibul maal memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimau oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otorisasi untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).

2. Pembagian keuntungan, untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Namun tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Penghentian *mudharabah*, kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua *asset* dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika *asset* belum dalam bentuk cair, kepada *mudharib* harus memberi waktu untuk melikuidasi *asset* agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Muhammad (2005:92) menjelaskan bahwa *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

1. Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai Mudharib (pengelola modal) dan deposan sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal). Bank sebagai *Mudharib* akan membagi keuntungan kepada *Shahibul Maal* sesuai dengan nisbah (presentase) yang telah disepakati bersama;
2. Deposito *Mudharabah* (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan data dengan apa adanya tanpa menambah dan menguranginya (Cik Hasan Bisri 2003:62). Dalam hal ini adalah penelitian mengenai “Pelaksanaan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor”

2. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah hasil observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini yaitu salah satu staff Bank Syariah Mandiri Bapak Abdurrahman Faqih
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Baik berupa surat kabar atau informasi selebaran yang kaitannya dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. Antara lain:
 - 1) *Brosur* Bank Syariah Mandiri;
 - 2) Fatwan DSN tentang Deposito;
 - 3) Laporan bagi hasil dari Bank Syariah Mandiri;
 - 4) Muhammad, dengan judul *Manajemen Dana Bank Syariah*;
 - 5) Ascarya, dengan judul *Akad & Produk Bank Syariah*;
 - 6) Muhammad Syafi'i Antonio, dengan judul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*;

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian berupa penjelasan, meskipun dalam penjelasan ini dijumpai angka-angka yang merupakan rangkaian dari penjelasan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor yang sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- b. Observasi, dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi yang objektif dari suatu masalah yang ingin penulis ketahui.
- c. Kepustakaan, yaitu penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan masalah yang peneliti selidiki sebagai referensi.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Mengimplementasikan data yang sudah ada yang berbentuk angka-angka ke dalam penjelasan.
- c. Menghubungkan data mengenai *mudharabah* dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap deposito di Bank Syari'ah.

